

WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK INDONESIA YANG DIADOPSI OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oeke Reva Ade Pratiwi

Ulfa Azizah, SH., MKn.
Ratih Dheviana Puru.H.T., SH., LLM
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
@genosida 2esa@yahoo.com

ABSTRAK

Pengangkatan anak Indonesia oleh WNA merupakan salah satu upaya perlindungan anak bertujuan melindungi anak dan membahagiakan mereka dengan memiliki keluarga yang melindungi, mendidik, serta memberikan kasih sayang. Berlandaskan pasal 44, 45, dan 46 Peraturan Menteri RI No. 110 Tahun 2009 merupakan persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh WNA. Namun realitanya banyak oknum dari pengadilan, departemen sosial, maupun departemen luar negeri yang tidak mengikuti persyaratan dan tata cara yang berlaku. Hal itu dapat membuat WNA tidak bertanggungjawab apabila terjadi suatu masalah dalam pelaksanaannya, sehingga membuat anak angkat tidak memiliki perlindungan hukum baik dari segi preventif dan represif untuk dipertanggungjawabkan. Pemerintah Indonesia merasa lalai atas kejadian tersebut, maka diperlukan upaya hukum yang lebih spesifik untuk pengangkatan anak Indonesia oleh WNA agar pemerintah dapat memperhatikan pelaksanaan pengangkatan anak Indonesia serta agar tidak ada lagi pengangkatan anak Indonesia oleh WNA yang ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengangkatan Anak Indonesia, dan Warga Negara Asing.

INDONESIAN CHILD PROTECTION LAW OF ADOPTION BY FOREIGN CITIZEN IN POSITIVE LAW IN INDONESIA ABSTRACT

Indonesia child adoption by foreign citizens is one of the efforts to protect children whereas it could be implemented with the aim to protect children and their happiness by having a family that can protect, educate, and give love to the basis of article 44, 45, and 46 Ministerial Regulation Republic of Indonesia No. 110 of 2009 are the requirements and procedures that must be met if the conditions and procedures are met, then the Indonesian adoption by foreign citizens can be done well without any problems which will be raised. But in reality many either elements of the court, socio department, and the state department who does not follow the requirements and procedures in advanced, it may make foreign citizens are not responsible if there is a problem with its implementation and make the adopted child does not have either legal protection in terms of preventif and represif to be accounted for thus Indonesian government was negligent for incident, it would require a more specific remedy for adoption by foreign citizens Indonesian government is to pay attention to the implementation of the adoption so that the implementation of adoptions by foreign citizens can be accomplished in accordance with legalism prevailing in Indonesia.

Key Words: Legal Protection, Indonesian Child Adoption by Foreign Citizens.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah anugerah yang diinginkan oleh setiap keluarga untuk melengkapi kebahagiaan mereka serta dapat memberikan kasih sayang yang mereka miliki untuk diberikan kepada anak yang akan mereka jaga, dididik, rawat, serta mereka besarkan hingga anak mereka dewasa dan bisa bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Menurut pemikiran pasangan yang telah menikah, anak adalah buah hati yang sangat dinanti–nantikan kehadirannya dalam kehidupan berkeluarga.¹ Hal ini pula yang menjadi tujuan utama dari hadirnya seorang anak dalam keluarga yaitu untuk meneruskan garis keturunan keluarga, menjadi pewaris keluarga sekaligus menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang dalam meneruskan cita-cita bangsa, namun, terkadang Tuhan belum mempercayakan karunia itu kepada sebagian orang tua yang sudah sangat mendambakan kehadiran seorang anak untuk menyempurnakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga yang utuh dan banyak pula orang tua yang tidak kenal putus asa untuk berjuang untuk memiliki buah hati dengan berbagai cara, yang salah satu alternatifnya adalah dengan pengangkatan anak atau biasa disebut adopsi.

Pengertian adopsi sendiri adalah pengangkatan anak orang lain dianggap anak sendiri oleh orang tua angkatnya secara hukum serta telah mendapat persetujuan dari orang tua kandungnya, sehingga menimbulkan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya. Fungsi utama dari adopsi adalah untuk melanjutkan keturunan dalam sebuah keluarga. Namun, setelah perang dunia kedua berkembang fungsi lain dari adopsi (pengangkatan anak) yaitu untuk mengurangi atau mengakhiri penderitaan atas kekurangan kebutuhan hidup serta pertumbuhan anak. Sehingga, yang pada mulanya adopsi hanya berfungsi untuk kepentingan bagi pihak yang mengangkat anak (*adoptant*), maka sekarang fungsi adopsi tersebut berubah menjadi fungsi sosial kemanusiaan.² Perlindungan anak sendiri merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak sama seperti melindungi manusia, yang dimana artinya membangun manusia seutuhnya. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³ Perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan

¹ Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 5.

² Sudargo Gautama (Gouw giok siong), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid ke Tiga (Bagian Pertama) Kinta, Jakarta, 1969, hlm. 95.

³ Rahayu, 2009, Hukum Pengangkatan Orang, <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, (diunduh pada hari Kamis, 20 Desember 2012 pukul 10.00 WIB)

pancasila.⁴ Dalam BW tidak diatur tentang masalah pengangkatan anak (adopsi) ataupun lembaga pengangkatan anak, faktanya pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorangan dalam keluarga. Maka, pada saat pemerintahan Hindia Belanda dibuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi ini, yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak. Khususnya pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak. Sedangkan dalam segi hukum adat, pengangkatan anak bagi masyarakat Indonesia merupakan suatu kebutuhan dimana adanya motivasi dari pengangkatan anak. Motivasi adopsi di Indonesia ditinjau dari hukum adat ada berbagai macam yaitu salah satunya karena ada faktor kepercayaan dari hukum adat yang dipercaya oleh masyarakat tersebut, dalam hukum adat di Indonesia mengenal dengan adanya sistem kekerabatan, yaitu ada sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental.

Dan dalam hukum Islam lebih tegas dijelaskan, bahwa pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan bahwa pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak yaitu dengan beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, menjaga, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Di Indonesia sendiri telah mengenal sistem hukum Adopsi atau Pengangkatan Anak secara Internasional, antara lain : Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (*dosmetic adoption*) dan Pengangkatan Anak anatar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*inter-country adoption*).⁵ Pengaturan pengangkatan anak internasional di Indonesia memakai sistem hukum status personal anak adopsi oleh warga negara asing yang tercantum dalam Pasal 16 A.B. Dalam ketentuan pasal tersebut mengandung kaidah perdata mengenai status personal orang asing di Indonesia, dimana bagi orang asing yang berada di Indonesia mengenai status personalnya berlaku hukum nasional mereka sendiri ataupun berlaku hukum Indonesia yang dimana dalam hal hukum nasional mereka menganut azas domisili, sehingga kaidah ini menegaskan penerapan prinsip resiporitas (*reciprocity*).

Sebagai contoh anak bernama Erwin yang berasal dari Tegal yang masih berusia 2 bulan diangkat oleh sepasang suami istri warga negara asing berkewarganegaraan Irlandia bernama Joseph Dowse-Lala pada tahun 2001, kemudian Erwin diubah namanya oleh mereka menjadi Tristan Dowse dan kewarganegaraannya pun berubah menjadi warga negara Irlandia. Joseph dan Lala Dowse mengadopsi Erwin/Tristan karena mereka berdua belum memiliki seorang anak, namun seiring berjalannya waktu selama setahun istri dari Joseph Dowse

⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1987, hal. 20.

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

yaitu Lala hamil, dengan perkembangan kehamilan Lala, Erwin/Tristan seperti ditelantarkan dengan mengembalikannya ke panti asuhan Immanuel Bogor bahkan Joseph juga berusaha membatalkan kewarganegaraan Erwin/Tristan. Pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh Joseph Dowse ternyata dilakukan secara ilegal karena pengangkatan anak Indonesia harusnya mendapatkan surat izin yang sah dari menteri sosial untuk dapat surat penetapan pengangkatan anak dari pengadilan, namun ada oknum-oknum pengadilan yang bekerjasama dengan pihak lain untuk dapat membuat surat izin pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membuat Ditjen Imigrasi dan Deplu mengeluarkan surat izin pengangkatan anak tersebut tanpa melihat apakah surat yang akan dikeluarkan sudah sesuai dengan persyaratan.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing dalam hukum positif Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder, juga tersier diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat. Penelusuran pustaka ini penulis lakukan di Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Kota Malang, dan dengan *browsing* melalui jaringan internet.

C. PEMBAHASAN

1. Wujud Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Pengangkatan Anak Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam Hukum Positif Indonesia

Anak-anak memiliki hak dan kewajiban yang sama pada umumnya yang memerlukan suatu perlindungan hukum. Perlindungan itu sendiri adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif yang menjadi suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu adanya keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁶ Perlindungan juga menjadi sebuah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan,⁷ maka para aparat membuat suatu peraturan mengenai perlindungan hukum khusus untuk anak-anak yakni perlindungan anak.

⁶ Rahayu, 2009, Hukum Pengangkatan Orang, <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, (diunduh pada hari Kamis, 20 April 2013 pukul 21.00 WIB)

⁷ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.205

Perlindungan anak merupakan suatu upaya dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.⁸

Upaya perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga sang anak sendiri, namun perlindungan juga dilakukan oleh masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang bertujuan untuk mengupayakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan setiap anak baik fisik, mental maupun sosialnya sesuai dengan kebutuhan setiap anak.⁹ Perlindungan anak dari keluarga merupakan perlindungan yang diberikan dari orang-orang terdekatnya agar si anak dapat memenuhi kewajibannya serta mendapatkan apa yang menjadi haknya, selain itu keluarga memelihara dan mendidik agar si anak dapat menjadi anak yang baik. Sedangkan negara (pemerintah maupun lembaga lainnya) melindungi kesejahteraan anak, baik dari segi jasmani, rohani, pendidikan, ekonomi, sosial serta kehidupan yang dijalannya untuk menggapai cita-cita. Begitu pula dengan anak angkat yang merupakan anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga¹⁰, mereka juga memerlukan perlindungan karena anak angkat merupakan bagian baru bagi sebuah keluarga yang tidak ataupun belum dikaruniai seorang anak. Di Indonesia pengangkatan anak sudah menjadi sebuah lembaga resmi untuk terlindunginya anak angkat, karena pada saat ini banyak sekali modus kejahatan pengangkatan anak dengan alasan simpati kepada anak tersebut yang tidak memiliki orang tua, orang tuanya tidak mampu, maupun dengan alasan ingin menjadikan anak tersebut sebagai penerus keluarga, namun dalam kenyataannya anak tersebut disia-siakan oleh keluarga angkatnya. Indonesia telah mengenal pengangkatan anak antar negara setelah pengesahan SEMA No.2 Tahun 1979, namun pengangkatan anak antar negara menimbulkan permasalahan baru yakni mengenai status personal merupakan kondisi keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan/diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya,¹¹ dan untuk menentukan penentuan status personal ada beberapa azas, yakni :¹²

1. Azas Nasionalitas atau Kewarganegaraan (*Lex Patriae*)

Merupakan hukum personil dari seseorang adalah hukum nasionalnya, hukum yang ditentukan oleh kewarganegaraannya. Setiap warga negara ini tetap takhluk di bawah hukum nasional negaranya kemanapun ia pergi.

2. Azas Teritorialitas atau Domisili (*Lex Domicili*)

⁸Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo CV, Jakarta, 1984

⁹ Ibid, hal.10

¹⁰ R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 175.

¹¹ Ratih Dheviana Puru, S.H., LLM, Power Point dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, 2011, hlm. 1

¹² Ratih Dheviana Puru, S.H., LLM, Power point dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, 2011.

Merupakan status personal suatu pribadi tunduk pada hukum dimana ia berdomisili.

3. Azas Lex Loci Celebrations

Merupakan hukum yang mengatur dimana tempat dilangsungkannya sebuah perkawinan dan dua orang mempelai harus tunduk kepada formalitas – formalitas setempat.

4. Lex Fori (tempat Gugatan)

Yaitu apabila obyek gugatan benda bergerak maka dalam hal mengajukan gugatan berdasarkan dimana benda bergerak tersebut berada.

Adapula ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 AB yang mengatur status personal yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat untuk kaula-kaula negara Belanda (kini baca : warga negara Indonesia) jikalau mereka berada di luar negeri.

Ataupun kewarganegaraan dari calon anak angkat yang berbeda dari calon orang tua angkatnya, ada azas-azas yang mempengaruhi kewarganegaraan yaitu :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.¹³

Kemudian adanya penyempurnaan dari SEMA No.2 Tahun 1979 yakni SEMA No.6 Tahun 1983. Dan pada tahun 1990 Indonesia mengikuti konvensi yang diikuti oleh beberapa negara juga dengan tema hak-hak anak dimana hal itu untuk menggupayakan perlindungan bagi anak pada umumnya serta bagi negara yang mengakui sistem pengangkatan anak juga perlu melindungi calon anak angkat. Kemudian adanya pengkhususan perlindungan bagi anak merupakan implementasi dari KHA No.36 Tahun 1990 yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana beberapa menjelaskan mengenai anak angkat yang berhak tahu asal-usul mereka serta pemerintah memberi pengarahan bagi calon orang tua angkat khususnya warga negara asing yang ingin mengangkat anak berkewarganegaraan Indonesia, disamping itu pula UU No.23 Tahun 2002 juga mencantumkan pasal-pasal bagi calon orang tua angkat yang melakukan tindak

¹³ Titik Triwulan Tutik, Op.cit, hlm.49

kejahatan terhadap anak angkatnya dapat dikenai sanksi. Sehingga bagi calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak berkewarganegaraan Indonesia harus memenuhi baik persyaratan materiil maupun administrasi yang tercantum dalam PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri No.110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

No.	Undang-Undang	Pasal	Analisa
1	Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvesi Hak Anak	Pasal 21	Dalam pasal 21 menjelaskan bahwa bagi negara-negara pihak yang mengakui adanya sistem pengangkatan anak yang ikut serta dalam pengesahan konvensi ini harus memberikan jaminan untuk kepentingan terbaik serta keselamatan sang anak angkat yakni pejabat yang berwenang menjamin keputusan yang diberikan telah sesuai dengan prosedur serta hukum yang berlaku di Indonesia, menjamin bahwa pengangkatan anak dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menjalankan misi perlindungan anak terlebih lagi terhadap pengangkatan antar-negara dimana pemerintah dan lembaga yang berwenang harus memberikan perlindungan yang lebih ketat serta mengambil langkah yang pasti agar pada saat penempatan anak angkat tidak terjadi suatu kesalahpahaman, sehingga bila pengangkatan anak berjalan dengan baik dan lancar dapat meningkatkan hal-hal yang ingin dicapai dalam konvensi tersebut.
2	UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM	Pasal 25	Dalam pasal 25 menjelaskan bahwa bagi negara-negara pihak yang telah menempatkan anak angkat ke rumah orang tua angkatnya harus menjamin dan mengakui hak-hak anak tersebut baik jasmani rohani, fisik mental,serta adanya pengawasan secara bertahap kepada anak angkat setelah ditempatkan di orang tua angkatnya. Ada empat kategori hak dalam macam-macam hak-hak anak yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan yang terakhir hak untuk berpartisipasi, itulah kategori hak perlu diutamakan untuk dapat melindungi anak-anak.

		Pasal 66 (angka 5, 6, dan 7)	Dalam pasal 66 menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak khususnya dalam hal perlindungan dari segala kejahatan agar kehidupan anak-anak kedepannya akan jauh dari eksploitasi, penyiksaan, trafficking, pelecehan seksual dan lain sebagainya dapat merenggut kebebasan mereka. Perlindungan yg diberikan bukan hanya dari keluarga namun masyarakat dan pemerintah juga perlu ikut melindungi, karena anak bisa saja dipisahkan dari orang tuanya secara hukum yang sah demi kepentingan terbaik si anak. Peraturan ini juga berlaku bagi anak angkat dimana sang anak ikut dengan orang yang bukan orang tua kandungnya, serta anak angkat juga memiliki hak-hak kebebasan yang sama dengan anak-anak yang lainnya.
3	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<p>Pasal 41</p> <p>Pasal 43</p>	<p>Dalam pasal 41 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak harus dilakukan bimbingan serta pengawasan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan itu sendiri jika hal itu tidak dijalankan akan ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan keadaan tersebut. Bimbingan itu sendiri ada lima kategori yang diatur dalam pasal 26 PP No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu: a) Penyuluhan; b) Konsultasi; c) Konseling; d) Pendampingan; e) Pelatihan. Dengan adanya berbagai kegiatan yang dikategorikan sebagai bimbingan diharapkan dapat membantu tidak hanya pemerintah namun juga para calon orang tua angkat agar dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.</p> <p>Pasal 43 menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk memeluk agamanya yang dimana tidak hanya negara tapi juga pemerintah, lembaga, orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib melindungi hak anak tersebut agar anak merasa aman dan nyaman untuk menjalankan ibadahnya. Hal yang dapat dilakukan pemerintah, lembaga sosial, serta orang tua untuk</p>

			<p>k melindungi dengan cara memberi pembinaan, dan mengajarkan pengalaman ajaran agama kepada anak pada saat anak telah dapat menentukan agama yang diyakininya.</p>
		Pasal 77	<p>Pasal 77 menyatakan bahwa anak yang diperlakukan secara diskriminasi dan ditelntarkan yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental serta mengalami kerugian materil dan moril yang dapat menghambat fungsi sosial yang dimiliki anak. Dan bagi pihak yang melakukan hal itu dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000;</p>
4	Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	Pasal 79	<p>Pasal 79 meyatakan setiap cota yang mengangkat anak harus memenuhi persyaratan materi dan administrasi yang ada serta mematuhi proses panjang yang harus dilakukan dalam pengangkatan anak Indonesia oleh wna, jika cota melakukan pengangkatan anak Indoensia bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000;</p>
5	PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Pasal 83	<p>Pasal 83 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dengan sengaja memperdagangkan dan/atau menculik anak untuk keuntungan sendiri dapat dikenai sanksi pidan penjara paling lama 15 tahun serta dikenai sanksi denda paling banyak Rp. 300.000.000;</p>
		Pasal 6	<p>Pasal 6 menjelaskan mengenai status kewarganegaraan anak yang akan diangkat oleh wna dan kemudian akan dibawa ke negara asal mereka, adalah anak memiliki status kewarganegaraan ganda yaitu kewarganegaraannya sendiri sebagai warga</p>

		<p>Pasal 12</p> <p>Pasal 13</p> <p>Pasal 14</p>	<p>negara Indonesia dan pula ikut dalam kewarganegaraan orang tua angkatnya. Setelah anak berumur 18 tahun, anak boleh memilih salah satu dari dua kewarganegaraan yang ia miliki untuk menjadi kewarganegaraan yang melekat seumur hidupnya dengan cara membuat pernyataan tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang serta melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan memiliki satu kewarganegaraan dengan waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berumur 18 tahun.</p> <p>Pasal 12 menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk calon anak angkat yakni harus belum genap usia 18 tahun, calon anak angkat merupakan seorang anak yang tidak memiliki orang tua, calon anak angkat berada dalam asuhan wali dan/atau sanak saudara ataupun dalam asuhan lembaga pengangkatan anak dengan prioritas utama anak yang belum genap berumur 6 tahun dan anak yang belum genap berumur 18 tahun jika calon anak angkat dalam perlindungan khusus.</p> <p>Pasal 13 merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon orang tua angkat baik pengangkatan anak antar warga negara Indonesia maupun pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing. Pada umumnya syarat yang harus dipenuhi adalah calon orang tua angkat memiliki kesehatan jasmani rohani yang baik, umur calon orang tua angkat tidak kurang dari 30 tahun dan tidak lebih dari 55 tahun, calon orang tua angkat telah menikah sekurang-kurangnya selama 5 tahun, calon orang tua angkat juga memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat serta, kondisi ekonomi dan sosial dari keluarga angkat bisa dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan calon anak angkat, dan terakhir membuat surat pernyataan bahwa pengangkatan anak adalah demi</p>
--	--	---	---

6	UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pasal 17	<p>kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya itu calon orang tua angkat juga harus membuat surat izin persetujuan dari pihak calon anak angkat</p> <p>Pasal 14 merupakan kelanjutan dari penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf a mengenai persyaratan tambahan yang diperlukan untuk pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yakni pengangkatan anak Indonesia harus melalui lembaga pengangkatan anak yang ada di Indonesia, kemudian adanya surat izin tertulis dari pemerintah negara asal orang tu angkat atau perwakilan negara orang tua angkat yang ada di Indonesia juga mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial.</p>
		Pasal 22	<p>Berbeda dengan pasal 13 mengenai persyaratan pengangkatan anak pada umumnya, namun pada pasal 14 dan pasal 17 lebih mengkhususkan bagi pengangkatan anak Indonesia oleh calon orang tua angkat berkewarganegaraan asing dengan persyaratan tambahan lainnya yaitu adanya pernyataan persetujuan untuk pengangkatan anak dari Departemen Luar Negeri RI melalui perwakilan RI setempat dan orang tua angkat juga telah berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya selama 2 tahun.</p>
		Pasal 47	<p>Berbeda dengan pasal 13 mengenai persyaratan pengangkatan anak pada umumnya, namun pada pasal 14 dan pasal 17 lebih mengkhususkan bagi pengangkatan anak Indonesia oleh calon orang tua angkat berkewarganegaraan asing dengan persyaratan tambahan lainnya yaitu adanya pernyataan persetujuan untuk pengangkatan anak dari Departemen Luar Negeri RI melalui perwakilan RI setempat dan orang tua angkat juga telah berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya selama 2 tahun.</p> <p>Pasal 22 menjelaskan apabila proses persyaratan telah terpenuhi, maka proses selanjutnya calon orang tua angkat mengajukan surat permohonan pengangkatan anak ke</p>

			<p>pengadilan yang berwenang, kemudian pengadilan akan memproses dengan cara meneliti berkas-berkas yang akan menjadi bukti bahwa calon orang tua angkat dapat dikatakan mampu untuk merawat, mendidik, dan mengangkat anak. Setelah berkas-berkas persyaratan yang diajukan telah terpenuhi atau lengkap, maka pengadilan akan surat putusan mengenai persetujuan pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing dan salinan dari putusan tersebut akan diberikan kepada instansi terkait.</p> <p>Isi dalam pasal 47 menjelaskan bahwa pendaftaran pengangkatan anak tidak hanya dalam negeri saja melainkan orang berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia juga harus mendaftarkan apabila melakukan pengangkatan anak Indonesia. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh para calon orang tua angkat khususnya orang tua angkat berkewarganegaraan asing yang harus memenuhi persyaratan administrasi apabila ingin sang anak memiliki kejelasan mengenai statusnya yakni apa sang anak akan ikut orang tua angkatnya dimana sang orang tua angkat berasal dan apa sang anak akan mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya. Para orang tua angkat harus mendaftarkan sang anak ke dinas kependudukan apabila telah mendapatkan surat salinan putusan dari pengadilan dimana orang tua angkat mengajukan surat permohonan untuk pengangkatan anak di Indonesia. Namun tidak hanya itu orang tua angkat wajib melaporkan serta mencatatkan pada instansi yang berwenang di negara asal mereka bahwa mereka telah melakukan pengangkatan anak di negara mereka berdomisili</p>
--	--	--	--

2. Wujud Perlindungan Hukum Represif Terhadap Pengangkatan Anak Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam Hukum Positif Indonesia

Di Indonesia pengangkatan anak sudah dikenal pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang membuat peraturan tersendiri tentang pengangkatan anak yaitu

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pasal-pasal tersebut berisikan tentang calon orang tua angkat yang boleh mengangkat anak, anak yang boleh diangkat, kemudian tata cara pengangkatan anak, akibat pengangkatan anak, dan yang terakhir mengenai batalnya suatu pengangkatan anak.¹⁴

Pada tahun 1979 pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamahh Agung No.2 mengenai Pengangkatan Anak, kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan SEMA No.6 mengenai Penyempurnaan SEMA No.2 Tahun 1979, lalu pada tahun 1989 pemerintah Indonesia mengeluarkan lagi SEMA No.4 tentang Pengangkatan Anak, dan pada tahun 2005 Indonesia menyempurnakan SEMA No.4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak dengan SEMA No.3. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung dari tahun 1979 hingga tahun 2005 dan adanya penyempurnaan dari SEMA tersebut membuat Indonesia mengenal pengangkatan anak secara resmi. Indonesia sendiri mengenal dua jenis pengangkatan anak yakni pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warganegara asing, termasuk kategori yaitu pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing ataupun sebaliknya. Jadi anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing, maka sang anak dapat berpindah kewarganegaraan beserta domisilinya mengikuti orang tua angkatnya. Karna hal itu, pemerintah Indonesia memiliki peraturan bagi calon orang tua angkat yang ingin mengangkat seorang anak, baik berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang telah mengenal hukum perdata internasional yakni perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diluar wilayah negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan hukum perdata diwilayah negara Indonesia, begitu pula dengan pengangkatan anak internasional yang menjadi bagian dari HPI dan di Indonesia sendiri memiliki azas-azas yang akan digunakan untuk menentukan status personal seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum serta hukum mana yang digunakan dan diberlakukan. Indonesia merupakan negara yang memakai sistem choice of law yang dimana seseorang warga negara asing dapat menggunakan azas-azas dan sistem apapun yang berlaku di Indonesia agar mempermudah melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia termasuk pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing yang berdomisili di Indonesia, namun dalam lapangan hukum perdata internasional ada lima sistem yang dapat digunakan, yaitu syarat-syarat dan akibat-akibatnya digunakan Hukum Nasional anak angkat; syarat-syarat dan akibat hukumnya menggunakan Hukum Nasional orang tua angkat; syarat-syarat menggunakan Hukum Nasional orang tua angkat dan akibatnya menggunakan Hukum Nasional anak angkat; sistem Kumulasi; dan sistem Ditribusi.

¹⁴ H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, RajaGrafindo Pesada, Jakarta, 2008, hlm. 22-29.

Indonesia sendiri memakai sistem Kumulasi yang merupakan syarat-syarat maupun akibatnya dapat menggunakan hukum nasional orang tua angkat maupun hukum nasional anak angkat meskipun sistem tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan sistem hukum perdata internasional, namun sistem ini dapat digunakan di Indonesia karena Belanda adalah tempat kita (Indonesia) meletakkan titik berat atas perkara-perkara yang memiliki sangkut paut dengan Indonesia. Dengan kata lain hukum yang digunakan di Indonesia sekarang merupakan hukum turunan atau warisan dari hukum yang ditinggalkan oleh Belanda¹⁵, namun ada pula keuntungan dalam menggunakan sistem ini yakni bahwa akan lebih banyak pengakuan dari pengangkatan anak yang bersangkutan baik dari negara pihak calon orang tua angkat maupun negara pihak anak angkat.¹⁶ Calon orang tua angkat juga dapat memakai hukum nasional mereka sendiri atau memakai hukum dimana mereka tinggal (*lex domicili*), sehingga dapat mempermudah proses pengangkatan anak serta dapat menyelesaikan apabila terjadi suatu masalah dan menimbulkan ketidakpastian, maka dipilihlah hukum mana yang terberat.

Sistem ini juga sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia yakni dapat menggunakan asas *lex patrie* atau *lex domicili* untuk menentukan status personal dari masing-masing pihak atau menggunakan ketentuan yang tercantum dalam, pasal 16 AB. Dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak ada dua kompetensi yaitu: 1. Kompetensi Relatif yaitu mengesahkan suatu pengangkatan anak di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman anak yang diangkat; 2. Kompetensi Absolut yaitu pengadilan negeri yang merupakan badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak baik *domestic adoption* maupun *inter-country adoption*, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan.

Tetapi dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak berlakunya UU No.3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sehingga pengadilan agama mencakup kewenangan untuk menetapkan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,¹⁷ namun pengangkatan anak secara internasional pihak yang berwenang untuk mengesahkan surat permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat berkewarganegaraan asing tetap Pengadilan Negeri dan setelah putusan dikeluarkan, Pengadilan Negeri wajib memberika salinan putusan pengangkatan anak ke MA selain itu ke Departemen Hukum dan Ham, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, dan Kepolisian. Namun selain melalui meja hijau, ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa/kasus yang ada yakni lewat non litigasi (di luar

¹⁵ Ratih Dheviana Puru, S.H., LL.M, Power Point dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, 2011, hlm.2.

¹⁶ Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), Hukum Perdata Internasional, Buku keTujuh Jilid keTiga (Bagian Pertama) Kinta, Jakarta, 1969, hlm. 161

¹⁷ Ketentuan Pasal 49.a. butir 20 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No.3 Tahun 2006.

pengadilan) yang artinya sengketa atau beda pendapat perdata dapat didelesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di luar pengadilan negeri.¹⁸ Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, SH., MH. dalam proses litigasi menempatkan para pihak yang saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil begitu pula dengan yang dikatakan oleh Rachmadi Usaman, SH., MH. bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).¹⁹ Arbitrase dan APS merupakan sebuah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan berbagai pilihan penyelesaian di luar pengadilan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Dimulai dengan pengertian arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁰ Selain itu ada pula alternatif penyelesaian lainnya, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.²¹

Dalam kasus pengangkatan anak bernama Tristan Dowse alias Erwin yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah kelalaian pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pengangkatan anak dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah sampai pada akhirnya hal tersebut menjadi sebuah masalah dimana Tristan alias Erwin dikembalikan ke negara asalnya yaitu Indonesia tanpa adanya pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia oleh orang tua angkatnya yang berada di Irlandia. Seharusnya hal tersebut bisa saja tidak terjadi apabila orang tua angkat menggunakan peraturan dan persyaratan pengangkatan anak terlebih lagi orang tua angkat merupakan warga negara asing yang telah ada peraturan dan persyaratan tersendiri untuk warga negara asing yang ingin mengangkat anak Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HK/2009 mengenai Persyaratan Pengangkatan Anak serta Joseph Dowse tidak mendaftarkan pengangkatan Erwin alias Tristan ke administrasi kependudukan sesuai dengan pasal 47 UU No.23 Tahun 2006. Dalam kasus ini adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab di dalam pengadilan, Ditjen Imigrasi dan Departemen Luar Negeri karena mereka mengeluarkan surat izin pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing tanpa adanya izin dari Menteri Sosial dan proses tersebut terus berlanjut hingga dinas pengangkatan anak di Irlandia memberi persetujuan pada

¹⁸ Pasal 6 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS

¹⁹ www.hukumonline.com (diunduh pada hari senin, 16 Juni 2014 pukul 10.00 WIB).

²⁰ Pasal 1 angka 1 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

²¹ www.hukumonline.com (diunduh pada hari senin, 16 Juni 2014 pukul 10.00 WIB).

tanggal 17 September 2001 serta secara resmi diberikan kewarganegaraan Irlandia dan mendapat paspor, hal ini lah yang membuat terjadinya pengangkatan anak secara illegal hingga terjadinya trafficking yang berkedok pengangkatan anak, ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari pemerintah serta lembaga-lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengangkatan anak baik antar warga negara Indonesia maupun dengan warga negara asing. Seseorang dan/atau lembaga yang dengan sengaja memperdagangkan anak untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau lembaga dapat dikenai sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 83 UU.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, begitu pula dengan orang tua angkat dari Tristan alias Erwin yang dianggap telah menelantarkan dan mendiskriminasikan anak angkatnya dengan anak kandungnya yang baru saja lahir serta mereka melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Indonesia, mereka dapat dikenai sanksi dalam pasal 77 dan pasal 79 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta bergantinya kewarganegaraan Erwin alias Tristan yang diubah oleh Joseph Dowse tanpa adanya pencatatan resmi dari departemen keimigrasian yang mengakibatkan Erwin alias Tristan memiliki masalah pada kewarganegarannya dikarenakan Joseph membatalkan kewarganegaraan Irlandia yang selama hampir 2tahun telah dipakai oleh Erwin alias Tristan, dimana seharusnya Tristan alias Erwin memiliki dua kewarganegaraan yakni Indonesia dan Irlandia karena ia anak yang dilahirkan di Indonesia oleh kedua orang tua berkewarganegaraan Indonesia yang telah tercantum dalam pasal 6 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sehingga apabila tidak ada keterlibatan dari oknum-oknum pengadilan, departemen sosial, juga departemen imigrasi Erwin alias Tristan masih dapat menjadi warga negara Indonesia ia anak yang masih berumur dibawah 5tahun dan memiliki kewarganegaraan ganda yang pada saat ia berumur 18tahun baru dapat memilih kewarganegaraannya. Sedangkan bagi oknum-oknum yang terkait dengan permasalahan tersebut dapat dikenai sanksi yang juga tercantum dalam pasal 36 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dimana para oknum tersebut telah lalai untuk memberikan dan/atau menghilangkan status kewarganegaraa Indonesia Erwin alias Tristan untuk menjadi warga negara Irlandia yang kenyataannya tidak dicatatkan secara resmi di departemen imigrasi. Selain itu dapat diselesaikan melalui non litigasi seperti mediasi dimana kedutaan besar Irlandia dapat menjadi mediator bagi Joseph yang bersengketa dengan pemerintah Indonesia agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak Indonesia maupun Irlandia

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Wujud perlindungan hukum positif di Indonesia terhadap anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum macam yaitu perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dalam beberapa pasal dari beberapa undang-undang yaitu pasal 21 dan pasal 25 dalam Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, pasal 41 dan pasal 43 ayat 2 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 47 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 12, pasal 13, pasal 22, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 32 dalam PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, kemudian pasal 47 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 4, pasal 5, pasal 36, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41 dalam pengangkatan anak Indonesia oleh yang salah satunya warga negara asing kemudian pasal 44, pasal 45, pasal 46 merupakan pasal-pasal yang mencakup pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa yakni yang tercantum dalam pasal 66 angka 5, 6, dan 7 dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian pasal 77, pasal 79, dan pasal 83 dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 36 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal-pasal yang ada diharapkan dapat digunakan untuk bukan hanya untuk melindungi melainkan melaksanakan pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing agar tidak terjadi permasalahan.

2. Saran

Diharapkan adanya wujud perlindungan hukum bagi anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing baik secara preventif maupun represif, masyarakat dapat memahami bagaimana prosedur serta dapat membantu melindungi anak angkat dalam pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing

Diharapkan bagi pembuat peraturan perundang-undangan dapat membuat peraturan perundang-undangan yang sederhana namun lebih spesifik bagi anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing agar pemerintah beserta lembaga lainnya yang bergerak dibidang perlindungan dan pengangkatan anak dapat menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Effhar dan Dahara Prize, Semarang, 1990.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo CV, Jakarta, 1984.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997.
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, PT RajaGrafindo Pesada, Jakarta, 2008.
- H.M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardan, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana dan Perlindungan Anak, UM Press, Malang, 2003.
- Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga system Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press*, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudargo Gautama (Gouw giok siong), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid ke Tiga (Bagian Pertama) Kinta, Jakarta, 1969.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak;
Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Internet

<http://tharra.wordpress.com/2010/02/24/pengertian-dan-pendidikan-kewarganegaraan/>
(diunduh pada hari Sabtu, 1 Desember 2012 pukul 19.00 WIB)

<http://etaholic.wordpress.com/2012/06/25/analisa-kasus-adopsi-anak-internasional-di-dalam-dan-di-luar-indonesia-berdasarkan-ketentuan-hukum-perdata-internasional-dan-konvensi-hak-hak-anak-pbb/> (diunduh pada hari Minggu, 16 Desember 2012 pukul 12.00 WIB)

Rahayu, 2009, Hukum Pengangkutan Orang,

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>,
(diunduh pada hari Kamis, 20 Desember 2012 pukul 10.00 WIB).

www.hukumonline.com (diunduh pada hari senin, 16 Juni 2014 pukul 10.00 WIB).

Kamus

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

**WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK INDONESIA YANG
DIADOPSI OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**OEKE REVA .A.P.
NIM. 0910110203**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2014**